

BAB II
TINJAUAN UMUM ATAS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENERIMA PINJAMAN ATAS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM PIHAK PENYELENGGARA FINANSIAL
TEKNOLOGI BERPOLA *PEER TO PEER LENDING*

A. Tinjauan Umum Mengenai Pinjam Meminjam Uang

1. Pinjam meminjam uang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berkaitan dengan layanan pinjam-meminjam uang atau dalam istilah lainnya yaitu dalam layanan *Peer to Peer Lending* (Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi) pada mulanya berasal dari sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara *Peer to Peer Lending* sampai dengan terjadinya proses pinjam meminjam uang (transaksi) antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata mengenai Perikatan, dalam Pasal 1313 KUHPerdata dinyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Penyelenggaraan *Financial Technology* melalui *Peer to Peer Lending* (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) diatur dalam Pasal 1338 Buku III KUHPerdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Untuk dinyatakan sah serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila telah memenuhi

unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdata, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dinyatakan bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat dan telah ada kesesuaian keinginan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan³⁷.

Kesepakatan hal yang penting karena terikatnya suatu perjanjian setelah tercapainya kata sepakat. Dalam suatu perjanjian terdapat keinginan yang dikehendaki oleh para pihak terhadap hal-hal yang pokok dari perjanjian yang telah dibuat. Sejak tercapainya kata sepakat tentang suatu hal yang diperjanjikan, maka sejak itu pula lahir hubungan hukum antar kedua belah pihak yang membuat perjanjian dan menimbulkan hak kewajiban bagi mereka yang membuat perjanjian.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 KUHPdata menyatakan bahwa, “Setiap orang yang cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Semua perjanjian yang dibuat oleh orang yang cakap maka perjanjian tersebut akan

³⁷Riduan Syahrani, Op Cit, hlm 205

melahirkan tanggung jawab yang besar. Namun bagi orang-orang yang tidak cakap tersebut, akan sulit memahami mengenai hak tanggungjawab dikemudian hari akibat dari perjanjian yang dibuat itu”.

Pasal 1330 KUHPerdataberisi mengandung makna bahwa, orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian ialah orang belum dewasa,mereka yang berada dibawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melanggar membuat persetujuan tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian merupakan barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Dalam Pasal 1333 KUHPerdataberisi barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini harus tertentu, sedikit-tidaknnya harus ditentukan jenisnya, sedangkan untuk jumlahnya tidak perlu ditentukan, akan tetapi dikemudian hari dapat di perhitungkan.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUHPerdataberisi dinyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau dilarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Para ahli mengatakan bahwa *sebab* dalam Pasal 1336 KUHPerdato merupakan kejadian yang menyebabkan adanya utang, misalnya perjanjian jual-beli barang dan perjanjian peminjaman uang. Lalu dijelaskan pula dalam Pasal 1320 KUHPerdato ini pun berlaku terhadap perjanjian pinjam meminjam uang, tetapi ada syarat tambahan dan khusus lainnya yang harus dipenuhi yaitu mengenai bunga, biaya administrasi dan jangka waktu pembayaran.

Demikian syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahny suatu perjanjian pada umumnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdato. Syarat-syarat 1 dan 2 mengenai Kesepakatan dan Kecakapan dinamakan syarat *subyektif* dan apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka akibat hukumnya perjanjiannya dapat dibatalkan namun perjanjiannya tetap mengikat. Sedangkan syarat-syarat 3 dan 4 mengenai suatu hal dan suatu yang halal dinamakan syarat *obyektif*, apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum, artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan antar kedua belah pihak.

Pasal 1754 KUHPerdato menyatakan bahwa:

“Pinjam meminjam merupakan perjanjian dengan mana pihak satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Pasal 1754 KUHPerdara diatas menyatakan bahwa, seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, maka ia akan memberikan kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 1756 KUHPerdara menyatakan bahwa ‘‘Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.’’

Perjanjian menurut pendapat Subekti yaitu suatu peristiwa dimana salah satu pihak berjanji kepada pihak lain atau dimana dua pihak itu berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut KRMT Tirtodiningrat Perjanjian yaitu suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang³⁸.

Kewajiban bagi orang yang meminjamkan (sebagai pihak pemberi pinjaman) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak pemberi pinjaman baik sesuatu barang atau sejumlah uang akan mengembalikannya bilamana telah masuk waktu pengembalian³⁹.

Kewajiban bagi orang yang menerima pinjaman (sebagai pihak penerima pinjaman) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya

³⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 43

³⁹ Pasal 1761 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan. Apabila ia tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka ia diwajibkan membayar sesuatu yang dipinjamnya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, sedianya harus dikembalikan⁴⁰.

Proses pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh masyarakat (oleh pihak penerima pinjaman) dengan menggunakan bunga, baik bunga yang ditentukan oleh para pihak atau pun bunga yang sudah ditentukan oleh suatu lembaga yang berwenang.

Bunga dalam Pasal 1765 KUHPdata ialah bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian. Dan dalam Pasal 1766 KUHPdata menyatakan bahwa siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak elah diperjanjikan, tidak dapat menuntutnya kembali, maupun mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang; dalam hal mana uang yang telah dibayar selebihnya dapat dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok. Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjian tidak mewajibkan si berutang untuk membayarnya seterusnya; tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun

⁴⁰ *Ibid* Pasal 1764

pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang terjadi dalam kasus-kasus yang dijadikan referensi dalam penelitian ini seperti adanya kerugian materil dan kerugian immateriil yang dialami oleh para penerima pinjaman (debitur) seperti adanya proses penagihan pinjaman yang melibatkan pihak ketiga dengan cara intimidasi, adanya ancaman, penyebaran data debitur tanpa izin yang berpotensi mencerminkan nama baik para debitur. Bentuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara melalui pihak ketiga tersebut jelas merugikan para debitur.

Berdasarkan Pasal 1767 KUHPdata terdapat klasifikasi mengenai bunga diantaranya bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan didalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang. Sedangkan bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Dan besaran bunga ynag diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 No.22: 6% (enam persen).

Pasal 1365 KUHPdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk

mengganti kerugian terbuat. Perbuatan Melawan Hukum yang terjadi dalam kasus-kasus yang dijadikan referensi dalam penelitian ini sudah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHperdata yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya sebab-akibat, dan adanya kewajiban atas kerugian yang terjadi.

2. Pinjam meminjam uang menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet’

Kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melalui Peer to Peer Lending di Indonesia ini diatur dalam Pasal 5 Bagian Kedua mengenai kegiatan usaha dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang berbunyi “Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

B. Tinjauan Umum Mengenai Teknologi Finansial

1. Pengertian Teknologi Finansial

Teknologi Finansial atau dengan istilah lain sering disebut dengan *Financial Technology* (Fintech) yang merupakan sebuah industri berbasiskan teknologi dalam layanan keuangan yang melahirkan inovasi-inovasi yang dapat memfasilitasi layanan keuangan diluar lembaga keuangan yang bersifat konvensional sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses prosuk keuangan dalam melakukan transaksi.

Secara luas Teknologi Finansial (*Financial Technology*) diartikan sebagai industri yang memanfaatkan teknologi dalam mendukung dalam mendukung agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efektif dan efisien⁴¹. *Financial Technology* pun dapat diartikan sebagai perusahaan dan produk yang menerapkan teknologi digital untuk memberikan layanan perbankan dan layanan finansial⁴².

Teknologi Finansial merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi,

⁴¹ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk., *Teknologi Finansial : Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm 1

⁴² Danrivanto Budhijanto, dkk., *Fintech Lending di Masa Pandemi Kemudahan Yang diberikan dan Risiko yang Mengintai*, dalam Webinar Alsa Indonesia Legal Discussion, Bandung, Minggu 11 Oktober 2020.

dan/atau model bisnis baru yang dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Perkembangan teknologi finansial dilihat dalam satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan⁴³.

Pada dasarnya Finansial Teknologi membahas mengenai inovasi teknologi (*technology innovation*), gangguan proses (*process disruption*) serta transformasi layanan (*service transformation*). *Technology Innovation* merupakan sebuah pemicu dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan transformasi industri. Apabila ada teknologi baru dalam industri hal ini menunjukkan bahwa laju perkembangan teknologi mengalami peningkatan dari perkembangan dalam kemajuannya dan lebih transformatif dalam efeknya. *Process Disruption* merupakan proses penerapan inovasi teknologi yang secara tidak langsung mengganggu proses lembaga keuangan tradisional.⁴⁴

Sektor jasa keuangan harus berisap untuk pengembangan strategi organisasi yang lebih efektif dalam pelayanan keuangan dengan memanfaatkan perkembangan inovasi teknologi finansial yang pesat saat ini. Dengan pendekatan teknologi finansial ini akan menjadi model baru

⁴³Bank Indonesia, *Teknologi Finansial*, <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx> diakses tanggal 21 Oktober 2020 Pukul 19.07 WIB

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 2

dalam dunia industri ekonomi. Bidang ekonomi akan menjadi sepenuhnya tertanam dalam layanan keuangan, arus utama produk dan layanan akan sepenuhnya berbasis teknologi dan berbasis digital melalui platform-platform yang telah berkembang khususnya dalam *Financial Technology* melalui *Peer to Peer Lending* (Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi).

Lee dan Shin pada tahun 2018 terhadap ekosistem *Financial Technology* yang berfokus padalima elemen dasar ekosistem *Fintech* itu sendiri diantaranya sebagai berikut :

- a. *Start-up* Teknologi Finansial yang menyediakan layanan transaksi pembayaran, transfer, pengelolaan uang, pembiayaan dan pinjaman, perdagangan sekuritas, asuransi dan lainnya;
- b. Pengembangan teknologi seperti pengembangan layanan analisis *big data* dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*);
- c. Organisasi pemerintahan (regulasi keuangan dan legislatif);
- d. *Klien* baik individu dan badan hukum
- e. Lembaga keuangan tradisional seperti perusahaan pialang dan pemodal ventura.

2. Perkembangan Teknologi Finansial di Indonesia

Teknologi telah berkembang secara pesat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berbagai layanan elektronik lainnya. Dalam pemanfaatan teknologi, masyarakat sangat terbantu untuk mendapatkan layanan yang diperlukan. Seperti

halnya di bidang jasa keuangan atau *financial technology* pun telah mengalami perkembangan yang signifikan.

Perkembangan Teknologi Finansial yang berkembang dalam beberapa negara di dunia pun berdampak pada perkembangan teknologi di Negara Indonesia. Keinginan masyarakat untuk memperoleh kemudahan dalam akses pelayanan keuangan membuat pelaku usaha jasa keuangan terus berkembang dan berinovasi perubahan dari transaksi konvensional ke transaksi digital. Kegiatan-kegiatan masyarakat seperti mengunjungi Bank untuk melakukan transaksi kini telah beralih dengan hanya mengisi data diri dalam *platform* yang telah disediakan oleh para penyelenggara *Peer to Peer Lending* (pinjam meminjam uang dalam berbasis teknologi informasi)

Dengan adanya Finansial Teknologi, masyarakat terpencil pun dapat memanfaatkan layanan keuangan yang berbasis teknologi tanpa harus melakukan tatap muka untuk mendapatkan layanan keuangan. Finansial Teknologi terus berkembang dan mendukung agar dapat melakukan pencapaian terhadap tiga sasaran Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia pada tahun 2015-2019 diantaranya *kontributif* dengan mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, *stabil* yaitu dengan menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan, dan *inklusi* yang merupakan membuka akses keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kalangan masyarakat.

Perkembangan teknologi di Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2020 ini mempunyai peran diantaranya untuk mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang sangat besar, mendorong kemampuan ekspor usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang masih rendah, dan meningkatkan inklusi keuangan nasional.

Perkembangan hukum di Indonesia terkait dengan teknologi finansial dapat terlihat dari munculnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan ini terdapat aturan terkait dengan perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang tertera dalam Pasal 18 – Pasal 20⁴⁵.

Keberadaan *Financial Technology Peer to Peer Lending* telah berjalan di beberapa Negara namun keberadaan *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia ialah pada akhir tahun 2016, tepatnya pada tanggal 29 Desember 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan untuk *Fintech* yang bergerak di industri *Peer To Peer Lending*. Sektor *fintech* di Indonesia telah merambah ke berbagai sektor, seperti startup pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*) dan uang elektronik.

⁴⁵https://issuu.com/alsaindonesia/docs/ailrc_alma_fahri_rezzy diakses pada Rabu 28 Oktober 2020, Pukul 19.37 WIB

Perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi informasi (*financial technology*) di Indonesia telah menjadi keniscayaan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan teknologi. Sejalan dengan konsep Sektor Jasa Keuangan Indonesia *Financial Technology* dapat bersinergi dengan industri keuangan yang ada untuk memberikan multi manfaat kepada masyarakat dan juga harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang menyusun kebijakan strategis dan dapat memastikan risiko finansial teknologi dapat dimitigasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat⁴⁶.

3. Jenis-jenis Teknologi Finansial di Indonesia

1. *Crowdfunding*

Crowdfunding merupakan proses mengumpulkan sejumlah uang untuk suatu usaha oleh sejumlah besar orang, biasanya dilakukan melalui platformonline. Ada tiga pihak yang terlibatdalam platform crowdfunding, yaitu project owner, supporter (publik yang memberikan dukungan dana) dan penyedia platform. Ketiga pihak ini memiliki peran masing-masing dalam menciptakan sebuah ekosistem yang dapat menunjang kebutuhan tiap pihak.

2. *Peer-to-Peer Lending(P2PL)*

Peer-to-Peer Lending merupakan salah satu bentuk crowdfunding berbasis utang berupa praktik pemberian pinjaman

⁴⁶Muliaman D.Hadaad, *Financial Technology di Indonesia*, Otoritas Jasa Keuangan, <http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20-%20FinTech%20IBS%20June%202017.pdf>, diakses tanggal 21 Oktober 2020 Pukul 21.37 WIB

uang antar individu dimana peminjam dan pemberi pinjaman (investor) dipertemukan melalui platform yang diberikan oleh perusahaan P2PL. P2PL memberikan wadah bagi seseorang yang ingin meminjam uang dari seseorang yang tidak pernah dijumpai secara langsung sebelumnya. Begitu juga dengan investor, ia dapat memberikan pinjaman kepada seseorang yang ia tidak kenal dan informasi yang diketahui bisa hanya berdasarkan rekam jejak kredit dari peminjam.

3. Manajemen Risiko Investasi

Manajemen Risiko Investasi merupakan manajemen risiko dan investasi yang dapat membantu dalam hal mengambil keputusan terkait langkah finansial tertentu. Dengan memanfaatkan layanan finansial teknologi ini masyarakat yang memiliki dana untuk dialokasikan dalam investasi atau asuransi yang tepat.

4. *Payment, Clearing, dan Settlement*

Payment, Clearing, dan Settlement merupakan teknologi finansial yang bergerak di bidang pembayaran, baik yang diselenggarakan oleh perbankan ataupun dilakukan Bank Indonesia. Keberadaan fintech ini jelas sangat memudahkan para pengguna untuk melakukan transaksi pembayaran yang praktis, cepat, aman dan nyaman.

5. *Market Aggregator/Provisioning*

Market Aggregator/Provisioning yaitu teknologi finansial yang memiliki simpanan bank data tentang berbagai produk keuangan yang tersedia di pasaran. Portal market agregator akan sangat membantu masyarakat dalam menentukan pilihan pada suatu produk keuangan tertentu. Dengan menyajikan data tentang berbagai aspek produk keuangan seperti harga, fitur, dan manfaatnya.⁴⁷

C. Tinjauan Umum Mengenai *Peer to Peer Lending*

1. Pengertian *Peer to Peer Lending*

Payung hukum bagi kegiatan *peer to peer lending* di Indonesia saat ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan peraturan ini *peer to peer lending* diartikan sebagai berikut:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”⁴⁸

Dokumen Persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman di *Peer to Peer Lending* berupa foto KTP, foto NPWP pribadi, tanda daftar perusahaan, foto halaman depan buku tabungan, foto kantor dan lokasi usaha.

⁴⁷ Muhammad Afdi Nizar, *Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, https://www.researchgate.net/publication/323629323_Teknologi_Keuangan_Fintech_Konsep_dan_Implementasinya_di_Indonesia, diakses tanggal 12 November 2020

⁴⁸ Risna Kartika dkk, *Analisis Peer to Peer Lending di Indonesia*, <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/akuntabilitas> ; Volume 12 Nomor 2 Tahun 2019

Sampai dengan 22 Januari 2021, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 148 Perusahaan. OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar/berizin dari OJK⁴⁹..

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Termuat aturan mengenai Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Pengguna Jasa LPMUBTI, Perjanjian, Mitigasi Risiko, Tata Kelola Sistem TI, Edukasi dan Perlindungan Pengguna LPMUBTI, Tanda Tangan Elektronik, Prinsip dan Teknis Pengenalan Nasabah, Larangan, Laporan Berkala, Sanksi, Ketentuan Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Biaya pinjaman (bunga) di Fintech Lending dapat dibandingkan dengan bunga pinjaman di tempat lain (bisa lebih tinggi atau lebih rendah). Perjanjian di Fintech Lending adalah perjanjian perdata antara pemberi dan penerima pinjaman. Apabila tidak sepakat dengan besarnya bunga (biaya pinjaman), sebaiknya tidak melakukan transaksi. Tetapi apabila sudah sepakat, maka ada kewajiban dari masing-masing pihak. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah mengatur dalam code of conduct AFPI bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya,

⁴⁹Data Otoritas Jasa Keuangan per Januari 2021

biaya keterlabatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Contohnya, bila pinjam Rp1 juta, maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp2 juta⁵⁰.

2. Perbedaan *Peer to Peer Lending* dengan Bank

Berdasarkan hasil wawancara pada 13 November 2020 yang penulis lakukan bersama Bapak Nedy Pradana Purnama S.H.,M.M yang berkapasitas sebagai Legal Officier Bank BJB terkait dengan pembahasan pelaksanaan pinjaman uang di Bank dengan pinjam meminjam uang berpola *Peer to Peer Lending* yaitu terdapat beberapa rumusan diantaranya yaitu bahwa pelaksanaan pinjaman uang yang dilakukan di Bank BJB dilakukan secara tatap langsung antara pihak kreditur dan pihak calon debitur, syarat dan ketentuannya pun berbeda dengan syarat dalam *Peer to Peer Lending*.

Syarat dan ketentuan dalam pinjam meminjam uang di Bank khususnya di Bank BJB ini ialah salah satunya dalam bjb Kredit Mikro Utama yang sasaran utamanya ialah untuk Para pelaku usaha perorangan, kelompok usaha dan Badan Usaha (PT atau CV) dalam sektor ekonomi produktif yang termasuk kategori usaha mikro seperti pengusaha kecil, pedagang, wirausaha, wiraswasta produktif yang saat ini telah aktif menjalankan usahanya minimal selama 2 tahun, dengan dokumen

⁵⁰ Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> di akses tanggal 28 Januari 2021

persyaratannya seperti Dokumen calon debitur perorangan yaitu Identitas (copy sesuai asli), KTP calon debitur & pasangan (bila ada) yang masih berlaku NPWP calon debitur & pasangan, Kartu Keluarga, Akta Nikah/ Surat Cerai/Surat Kematian (apabila relevan), Dokumen Usaha (copy sesuai asli) , Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Dokumen kepemilikan Agunan (asli) beserta kelengkapan / dokumen pendukungnya.

Dokumen calon debitur badan usaha (PT) seperti Dokumen Identitas (copy sesuai asli), KTP Pengurus Badan Usaha , KTP Pemilik Agunan (jika agunan bukan atas nama badan usaha) , KTP Pasangan pemilik agunan (jika agunan bukan atas nama badan usaha), NPWP atas nama badan usaha, Identitas Perusahaan, Akta Pendirian PT dan perubahannya , Dokumen Usaha (copy sesuai asli) , Surat Ijin Usaha atas nama badan usaha , SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) dan Dokumen kepemilikan Agunan (asli). Dengan besaran bunga untuk yang baru mengajukan kredit sebesar 11.5% dan untuk yang *top up* sebesar 13,99%. Sedangkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengatur dalam *code of conduct* AFPI bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Contohnya, bila pinjam Rp1.000.000 (satu juta rupiah) maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp2.000.000 (dua juta rupiah).

Tahap selanjutnya dalam pinjam meminjam uang di Bank yaitu adanya pengecekan data calon debitur (nasabah) dalam pengajuan Kredit dengan menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan tujuan untuk menemukan data calon nasabah apakah memiliki Kredit di Bank yang lainnya. Sedangkan untuk *Peer to Peer Lending* Data pinjaman *fintech Lending* saat ini belum tercantum di SLIK, namun akan terekam dalam Pusat Data Fintech Lending (PUSDAFIL) yang memuat informasi mengenai pinjaman bermasalah dari pengguna dengan pinjaman bermasalah pada penyelenggara Fintech Lending yang telah terdaftar/berizin di OJK.

Menindaklanjuti point diatas ialah jika ternyata setelah diketahui data calon debitur/nasabah di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) terdapat riwayat angsuran kredit yang bermasalah (macet). Maka sesuai dengan praktik lapangan Bagian Account Officier Kredit Konsumer di Bank BJB tidak akan melakukan pencairan atas pengajuan kredit oleh nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan wawancara pada 13 November 2020 dengan Bapak Nedy Pradana Purnama sebagai Legal Officier Bank BJB yang mana dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini terkait dengan adanya restrukturisasi khusus untuk nasabah mikro tidak untuk nasabah kredit consumer. Restrukturisasi kredit tersebut ialah berupa penangguhan biaya angsuran, dalam jangka 1 Tahun/Bulan, pada waktu pembayaran selanjutnya nasabah tersebut membayar angsuran pokok dan bunga.

Selain dari itu ada pula tindakan yang dijadikan syarat adanya restrukturisasi kredit tersebut ialah dengan adanya survey kembali kepada nasabah tersebut apakah benar terkena dampak Covid-19⁵¹.

Hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan analisis prinsip 5C dalam pemberian kredit yang dihadapi untuk masalah hampir tidak ada, melainkan hanya terdapat beberapa unsur seperti pengisian data oleh calon nasabah yang harus diisi dengan baik dan benar dan hampir sering juga ada beberapa calon nasabah yang memberikan data yang tidak valid. Menurut beliau kembali lagi ke pihak bank itu sendiri bagaimana pintar-pintarnya dalam melakukan analisis terhadap calon nasabahnya, baik dalam hal pengecekan kebenaran data.

Maka dari itu, perbedaan *Peer to Peer Lending* dengan bank dapat dilihat dari segi model Finansia Teknologi berpola *Peer to Peer Lending* hanya mempertemukan saja secara perdata yaitu melakukan perjanjian antara lender dan borrower, selanjutnya untuk peminjaman uang di Bank dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena bank merupakan lembaga simpanan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sedangkan *Peer to Peer Lending* tidak dijamin oleh LPS namun *return* dari *Peer to Peer Lending* lebih tinggi karena risikonya

⁵¹ Wawancara dengan Legal Officier Bank BJB Cabang Utama Bandung, 13 November 2020

cukup tinggi, dan dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan bahwa finansial teknologi disebut sebagai lembaga jasa keuangan lainnya, berbeda dengan perbankan yang merupakan lembaga keuangan yang diatur dalam undang-undang perbankan dan finansial teknologi berpola *Peer to Peer Lending* baru diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

D. Kewenangan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelenggaraan Teknologi Finansial melalui *Peer to Peer Lending* di Indonesia

1. Latar Belakang Pembentukan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan serta penyidikan sektor Jasa Keuangan di Indonesia. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal ini dilandasai dengan adanya Perkembangan Industri Keuangan merupakan proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi keuangan

telah menciptakan industri keuangan yang dinamis dan saling keterkaitan.⁵²

Terdapat tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis. Peraturan perundang-undangan secara formal tentu akan melihat unsur yuridis sebagai yang paling penting. Hukum sebagai gejala sosial akan dilihat dalam unsur sosiologis, yang mengukur kebaikan hukum dari "*rechtsidee*" tentu menekankan pentingnya aspek filosofis. Kaidah yang mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*jurisdische gelding*) menunjukkan keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, keharusan mengikuti tata cara tertentu, dan keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dasar yuridisnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dasar filosofis pembentukan peraturan OJK ini ialah teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan

⁵² Op Cit Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan, Hlm.10

mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Sedangkan dari segi sosiologisnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 ini terdapat kegiatan pinjam meminjam uang secara teknologi finansial yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat.. Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian Nasional.

Adanya regulasi inilah yang nantinya diharapkan mampu berguna untuk mengatur terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana tujuan hukum dalam teori Utilitarian, yaitu menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada masyarakat melalui kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama dari pada hukum. Sehingga tidak ada lagi rasa khawatir dalam kegiatan pinjaman berbasis teknologi informasi. Perusahaan-perusahaan rintisan (*startup*) yang bermunculan di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dalam menjalankan jenis bisnis yang dijalankan yang berbasis *Financial Technology* salah satunya dengan system *Peer to Peer Lending*⁵³.

⁵³ <https://www.indrasatrianis.com/2020/05/06/implementasi-kebijakan-peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-77-pojk-01-2016/> diakses pada hari Rabu 28 Oktober 2020 Pukul 21.32 WIB

2. Latar Belakang Pembentukan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI) di Indonesia

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama di Indonesia (AFPI) tidak lepas dari perkembangan *Peer to Peer Lending* (Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi). Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha Fintech *Peer to Peer Lending*. AFPI ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia, berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019. Kehadiran AFPI menjadi asosiasi resmi yang ditunjuk OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Bab XII Pasal 48. Seluruh penyelenggara Fintech P2P Lending di Indonesia wajib mendaftarkan diri sebagai anggota AFPI.

Untuk beroperasi legal secara hukum, para penyelenggara harus terdaftar dan memperoleh izin resmi dari OJK. Meskipun sudah terdaftar, para penyelenggara ini tidak akan langsung memperoleh izin resmi dari OJK, melainkan melalui pemeriksaan secara detail untuk memastikan apakah pelaksanaan layanan tersebut telah sesuai aturan.

Namun, dewasa ini, banyak penyelenggara yang membuka layanan jasa keuangan *Peer To Peer Lending* kepada masyarakat secara ilegal. Selain tidak mendaftarkan organisasinya, penyelenggara ini juga melakukan pelanggaran berupa penetapan suku bunga yang tidak jelas alias sangat tidak masuk akal, penyebaran data pribadi peminjam serta tata

cara penagihan yang cenderung berupa ancaman. Seperti halnya, telah banyak ditemukan para peminjam sebagai korban bunuh diri akibat tagihan pinjaman online dengan suku bunga yang diluar kendali dan bersifat ilegal. Para pemilik layanan jasa keuangan P2P Lending kerap menyalahi aturan, menagih dengan mengakses data pribadi peminjam, hingga menagih ke orang-orang yang dikenal peminjam.